BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang Masalah

Pemanfaatan Teknologi informasi dan Komunikasi (TIK) pada pemerintahan atau dikenal dengan istilah *electronic Government* (*e-Government)* telah dikembangkan dalam berbagai bentuk aplikasi Sistem Informasi (SI) dan menjadi penunjang dalam pelaksanaan tugas pemerintahan di era globalisasi sekarang ini. Kemajuan TIK membawa perubahan dalam pelaksanaan kerja pemerintahan di Indonesia. TIK dipergunakan karena memiliki berbagai kelebihan yang menguntungkan dibandingkan dengan menggunakan cara tradisional dalam melakukan interaksi dan penyempaian informasi. Proses interaksi antara pemerintah dengan masyarakat, pelaku bisinis dan antar pemerintahan dapat dilaksanakan dengan lebih cepat dan tepat. Pengembangan aplikasi SI dan pelaksanaan kerja secara elektronik, dilaksanakan pada masing-masing instansi pemerintahan guna mewujudkan proses interaksi dan penyampaian informasi yang lebih baik..

Konsep *e-Government* yang diinstruksikan dalam Inpres Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government*, pada perkembangannya telah diterapkan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia. Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga penyelenggara Pemilu, mulai memanfaatkan TIK sejak Pemilu tingkat Nasional tahun 2004. Konsep *e-Government* pada KPU dirancang dalam *Grand Designd*

Sistem Informasi (GDSI) KPU (sumber: Buku I GDSI KPU). Pembangunan infrastruktur dan sistem TIK untuk kepentingan Pemilu dibangun mulai dari KPU tingkat Pusat hingga tingkat Provinsi dan tingkat Kabupaten atau Kota. KPU membangun infrastruktur dan sistem TIK pada masing-masing tingkat guna menunjang penyampaian informasi dan proses kerja secara elektronik.

Tujuan KPU membangun infrastruktur dan sistem TIK, diantaranya untuk mengumpulkan dan mempublikasikan hasil perolehan suara Pemilu dari seluruh wilayah pemilihan dengan cepat, akurat, dan transparan. Pemanfatan TIK penting untuk mengatasi kendala kondisi geografis yang sangat beragam dan tersebar. Penyampaian informasi yang cepat dan akurat memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut secara langsung mengawasi proses perhitungan suara. Masyarakat dapat langsung memantau adanya penyimpangan atau perbedaan dalam perolehan suara dan melaporkan adanya perbedaan tersebut kepada pihak yang bersangkutan.

Upaya mewujudkan proses penyelenggaraan Pemilu yang cepat, akurat, dan transparan melalui pemanfaatan TIK dilaksanakan hingga Pemilu di tingkat Daerah (Pilkada) Provinsi dan Kabupaten/Kota. KPU Provinsi Jawa Barat menerapkan konsep *e-Government* untuk menunjang pelaksanaan Pemilihan Gubernur Jawa Barat pada tahun 2008. KPU Propinsi Jawa Barat memiliki *website* sebagai salah satu media penyampaian informasi yang dapat diakses oleh Publik melalui situs *http://www.kpu.jabarprov.go.id*. Pemanfaatan TIK pada KPU Provinsi Jawa Barat, memungkinkan proses penyelenggaraan pemilihan

Gubernur, khususnya dalam penghitungan suara dapat dilaksanakan dengan lebih cepat, akurat, dan transparan.

Konsep *e-Government* yang diterapkan KPU Provinsi Jawa Barat masih terkendala oleh berbagai faktor yang menunjang pada tahap pelaksanaannya. Kendala yang dihadapai mulai dari kemampuan infrastruktur TIK, kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), ketersediaan anggaran, regulasi, hingga perubahan proses kerja secara manual yang masih dijadikan prioritas menjadi hambatan untuk melaksanaan *e-Government* secara optimal. Upaya KPU provinsi Jawa Barat untuk menyelenggarakan proses pelaksanaan Pemilihan Gubernur dengan lebih cepat, tepat, dan transparan melalui pemanfaatan TIK menjadi terkendala.

Infrastruktur TIK yang dimiliki KPU Provinsi Jawa Barat diperlukan untuk menjangkau berbagai lapisan, baik KPU Kabupaten/Kota maupun masyarakat di wilayah Provinsi Jawa Barat. Proses pengiriman dan pengolahan data dari seluruh KPU Kabupaten/Kota akan terkendala dengan adanya masalah sarana dan prasarana penunjang TIK serta kemampuan akses yang belum memadai. Kemampuan infrastruktur telekomunikasi yang kurang maksimal sedangkan kapasitas yang diperlukan cukup besar menjadi hambatan dalam pelaksanaan kerja secara elektronik dengan lebih baik.

Kemampuan SDM di bidang TIK berperan penting untuk melaksanakan proses kerja secara elektronik pada KPU Provinsi Jawa Barat. Proses kerja secara elektronik harus dioperasikan oleh aparatur yang benar-benar memahami proses kerja tersebut. Pelaksanaan proses kerja dan penggunaan aplikasi

e-Government yang dikembangkan oleh KPU Provinsi Jawa Barat, menjadi sulit untuk dilaksanakan karena masalah keterbatasan kuantitas dan kualitas aparatur yang memiliki kemampuan di bidang TIK. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, bahwa KPU Propinsi Jawa Barat dibantu oleh Sekretariat KPU Propinsi Jawa Barat. SDM aparatur yang ada pada Sekretariat KPU Propinsi Jawa Barat sebagian besar adalah Pegawai Negeri Sipil yang bukan berlatarbelakang pendidikan dari bidang TIK (Data Sub Bagian SDM KPU Propinsi Jawa Barat 2010).

Kendala kuantitas dan kualitas SDM di bidang TIK yang masih terbatas memerlukan adanya perangkat hukum/regulasi untuk mengatasinya. Perangkat hukum sebagai pedoman yang jelas bagi KPU Provinsi Jawa Barat menuntun pelaksanaan *e-Government* agar berjalan secara kondusif. Pemanfaatan TIK dalam Pemilu terkait sekali dengan pertukaran dan penyampaian informasi. Perangkat hukum yang jelas memberikan jaminan keamanan informasi yang dikelola oleh KPU Provinsi Jawa Barat. Perangkat hukum yang masih bersifat umum memberikan penafsiran yang beragam dalam pelaksanaan *e-Government* ditingkat instasi pemerintahan. KPU Provinsi Jawa Barat dalam memanfaatkan TIK pada Pemilihan Gubernur sudah sepatutnya ditunjang oleh perangkat hukum yang lebih jelas dan spesifik.

Perangkat hukum yang secara khusus mengatur pemanfaatan TIK, dapat dijadikan dasar untuk menerapkan, memelihara dan mengembangkan *e-Government* oleh KPU Provinsi Jawa Barat. Penerapan *e-Government* sesederhana apapun memerlukan ketersediaan anggaran yang mencukupi. Konsep

dan aplikasi *e-Government*, harus terpelihara dan dikembangkan agar tetap berjalan dan berkembang. Penerapan, pemeliharaan dan pengembangan *e-Government* harus ditunjang oleh sumber dana dan anggaran yang jelas dan sah. KPU Propinsi Jawa Barat tidak seperti instansi pemerintahan daerah yang memiliki keleluasaan untuk memperoleh sumber dana yang cukup dalam menerapkan *e-Government.*

Penerapan *e-Government* pada KPU Provinsi Jawa Barat dilaksanakan dengan segala kemampuan infrastruktur, SDM, perangkat hukum dan anggaran yang kurang memadai, serta pelaksanaan sistem kerja yang sebagaian besar masih dilaksanakan secara manual. Upaya KPU Provinsi Jawa Barat untuk mewujudkan konsep sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik belum menunjukkan adanya perubahan yang signifikan dengan masih dilaksanakannya sitem manajemen dan proses kerja secara manual. Pelaksanaan sistem manajemen dan proses kerja yang berbasis elektronik memerlukan adanya kesadaran dan keinginan untuk mengubah cara kerja, cara berpikir dan bersikap (perubahan paradigma) dari para pelaksananya. Pelaksanaan kerja secara manual telah biasa dilaksanakan sehingga lebih dipahami oleh aparatur KPU Provinsi Jawa Barat daripada dilaksanakan secara elektronik.

Sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik diterapkan karena mengingat tingkat konektivitas TIK yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan ruanglingkup wilayah kerja KPU Provinsi Jawa Barat cukup luas. Pemanfaatan TIK berperan penting, khususnya dalam hal pengelolaan administrasi dan penyampaian informasi Pemilihan Gubernur. Tingkat

konektivitas dan penggunaan TIK yang besar dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur, menunjukkan bahwa KPU Provinsi Jawa Barat harus benar-benar siap menerapkan *e-Government* secara optimal.

Kesiapan KPU Provinsi Jawa Barat dalam menerapkan *e-Government* menjadi faktor yang penting pada tahap pelaksanaannya. Pelaksanaan *e-Government* pada KPU Provinsi Jawa Barat dilaksanakan dengan mengembangkan aplikasi pendukung Pemilihan Gubernur. Pengembangan aplikasi *e-Government* untuk menunjang Pemilihan Gubernur dikembangkan dengan segala kesiapan yang dimiliki KPU Provinsi Jawa Barat. Aplikasi *e-Government* yang digunakan untuk meningkatkan pelayanan informasi Pemilu tersebut dikenal dengan nama Sistem Informasi Pemilu (SIPemilu).

SIPemilu digunakan untuk menunjang sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik pada KPU Provinsi Jawa Barat. Pengumpulan dan pempublikasian informasi Pemilihan Gubernur diolah menggunakan SIPemilu. Pengumpulan data dan informasi Pemilihan Gubernur diperoleh dari seluruh KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat. Proses pengiriman data ke KPU Provinsi Jawa Barat dilaksanakan dengan memanfaatkan jaringan TIK. Jaringan telekomunikasi, perangkat komputer dan perangkat lunak (*software*) menjadi penunjang yang penting untuk menggunakan SIPemilu. Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dengan memanfaatkan aplikasi SIPemilu merupakan inisiatif KPU Provinsi Jawa Barat untuk mewujudkan pelayanan informasi Pemilu yang lebih cepat, akurat dan transparan.

Informasi Pemililihan Gubernur sangat diperlukan oleh masyarakat dan pihak-pihak lain yang berkepentingan di wilayah Jawa Barat. Proses pengumpulan dan penyampaian informasi Pemilihan Gubernur yang berjalan dengan cepat, akurat dan transparan memberikan kejelasan kepada semua pihak yang bersangkutan. Volume pekerjaan KPU Provinsi Jawa Barat dalam proses pengumpulan dan penyampaian informasi Pemilihan Gubernur cukup luas. Informasi yang disampaikan oleh KPU Provinsi Jawa Barat diperoleh dari seluruh Kabupaten dan Kota se-Jawa Barat. Penggunaan SIPemilu dengan ditunjang dengan TIK, memungkinkan volume pekerjaan dalam Pemilihan Gubernur dapat dilaksanakan dengan lebih cepat dan transparan.

Pelaksanaan pemilihan Gubernur yang transparan dan dapat di awasi oleh berbagai pihak yang berkepentingan merupakan langkah KPU Provinsi Jawa Barat untuk mengmbalikan citra dan kepercayaan publik terhadap lembaga Negara atau Pemerintahan. Informasi Pemilihan Gubernur yang disampaikan KPU Provinsi Jawa Barat harus diproses secara akurat. Akurasi hasil pengolahan data yang tepat mendukung upaya KPU Provinsi Jawa Barat dalam mewujudkan transparansi pada Pemilihan Gubernur. Penggunaan SIPemilu dengan ditunjang oleh TIK memudahkan masyarakat untuk mengakses informasi Pemilihan Gubernur. Informasi Pemilihan Gubernur melalui melalui *situs http://www.kpu.jabarprov.go.id* dapat dipantau secara transparan.

Informasi yang tepat waktu, penting dalam rangka mengawal berjalannya pelaksanaan Pemilihan Gubernur. Pelayanan informasi Pemilihan Gubernur menjadi tepat guna dengan informasi yang disampaikan dengan tepat waktu.

Penyampaian informasi Pemilihan Gubernur melalui *situs http://www.kpu.jabarprov.go.id,* dapat diakses oleh siapa saja, khususnya oleh seluruh masyarakat Jawa Barat. Kesalahan sekecil apapun dan kurangnya keamanan informasi yang dihasilkan SIPemilu dapat menimbulkan keresahan dikalangan masyarakat.

Pengalaman pada Pemilihan Gubernur Jawa Barat tahun 2008 menunjukkan upaya KPU Provinsi Jawa Barat dalam meningkatkan pelayanan informasi melalui pemanfaatan SIPemilu, masih terkendala. Masyarakat masih sulit mendapatkan pelayanan informasi penghitungan suara melalui media *website* KPU Provinsi Jawa Barat. Informasi penghitungan suara tidak langsung di sampaikan melalui situs *http://www.kpu.jabarprov.go.id*. Masyarakat yang ingin mengetahui hasil sementara penghitungan suara, harus datang ke kantor KPU Provinsi Jawa Barat. Penyampaian informasi melalui situs *http://www.kpu.jabarprov.go.id*. tidak berjalan dengan cepat, disamping itu munculnya kendala pengaksesan yang sulit dilakukan oleh masyarakat. (sumber: kupalima.wordpress.com, 14/04/2008).

Pelayanan informasi melalui pemanfaatan SIPemilu menjadi perhatian publik karena adanya masalah keamanan pada situs KPU Provinsi Jawa Barat sebagai media yang diakses masyarakat. Situs KPU Provinsi Jawa Barat ditutup sementara karena adanya gangguan yang disebabkan oleh *hacker*. Gangguan yang terjadi menghambat proses pelayanan informasi melalui pemanfaatan SIPemilu. Pelayanan informasi yang disajikan melalui situs KPU Provinsi Jawa Barat menjadi terganggu (Sumber:kapanlagi.com, 14/04/2008).

Permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur tahun 2008, menunjukkan bahwa pelayanan informasi melalui pemanfaatan SIPemilu belum terlaksana secara efektif. Sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik yang ditunjang oleh aplikasi SIPemilu dikembangkan dan dilaksanakan dengan segala kesiapan yang dimiliki KPU Provinsi Jawa Barat dalam menerapkan *e-Government.* Faktor kesiapan KPU Provinsi Jawa Barat dalam menerapkan *e-Government* yang kurang memadai, menyebabkan pelayanan SIPemilu kurang berjalan dengan efektif pada tahap pelaksanaan Pemilihan Gubernur Jawa Barat.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut di atas, peneliti berinisiatif untuk mengambil judul **Pengaruh Kesiapan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Menerapkan *E-Government* terhadap Efektivitas Pelayanan Sistem Informasi Pemilu (Studi Kasus Pada Pemilihan Gubernur).**

I.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka fokus permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Apakah kesiapan KPU Provinsi Jawa Barat menerapkan *e-Government*?
2. Apakah efektivitas pelayanan SIPemilu dalam pemilihan Gubernur?
3. Seberapa besar pengaruh kesiapan KPU Provinsi Jawa Barat menerapkan *e-Government* terhadap efektivitas pelayanan SIPemilu dalam pemilihan Gubernur?

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh kesiapan KPU Provinsi Jawa Barat menerapkan *e-Government* terhadap efektivitas pelayanan SIPemilu dalam pemilihan Gubernur.

Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui kesiapan KPU Provinsi Jawa Barat menerapkan *e-Government*.
2. Untuk mengetahui efektivitas pelayanan SIPemilu dalam pemilihan Gubernur.
3. Untuk mengetahui besarnya pengaruh kesiapan KPU Provinsi Jawa Barat menerapkan *e-Government* terhadap efektivitas pelayanan SIPemilu dalam pemilihan Gubernur.

1.4. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan yang bersifat teoritis dan praktis, sebagai berikut:

1. Kegunaan bagi peneliti

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengalaman, wawasan, pengetahuan dan memberikan pemahaman mengenai pengaruh kesiapan KPU Provinsi Jawa Barat menerapkan *e-Government* terhadap efektivitas pelayanan SIPemilu dalam pemilihan Gubernur.

2. Kegunaan Teoritis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan Ilmu Pemerintahan khususnya dalam rangka mengembangkan

teori-teori mengenai Konsep *e-Government*, Sistem Informasi Daerah serta Sistem Kepartaian dan Pemilu, yang peneliti gunakan dan relevan dengan permasalahan penelitian ini.

3.Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini mudah-mudahan dapat dijadikan pertimbangan dan masukan dalam rangka penerapan *e-Government,* khususnya bagi KPU Provinsi Jawa Barat dalam mengimplementasikan SIPemilu dalam Pemilihan Gubernur selanjutnya.

1.5. Kerangka Pemikiran

E-Government pada dasarnya dapat menampakan dirinya dalam berbagai bentuk dan ruang lingkup. *e-Government* sering digambarkan atau dideskripsikan secara beragam oleh masing-masing individu atau komunitas. Hal ini disebabkan karena penerapan aplikasi *e-Government* memiliki ruang lingkup yang luas.

Menurut Akadun dalam bukunya yang berjudul *Teknologi Informasi Administrasi*, menjelaskan bahwa:

> *"e-Government* memiliki spektrum yang luas. Oleh karena itu perlu dibagi menjadi *e-Government* dalam level makro dan *e-Government* dalam level mikro. Pada level makro, kita membicarakan strategi nasional *e-Government*, kebijakan yang diperlukan, kaitannya dengan cakupan yang lebih luas (internasional), keterlibatan multi sektor baik nasional maupun internasional, kepentingan nasional, integrasi bangsa. dalam level mikro adalah strategi instansional, terfokus pada aplikasi , cakupan terbatas, keterlibatan sektor dalam skala lokal, pusat perhatiannya pada operasi egove itu sendiri dan bagaimana model kinerja akan dirancang dan dilaksanakan" (akadun, 2009:142).

Berdasarkan penjelasan tersebut, *e-Government* memiliki ruang lingkup yang luas. *e-Government* pada level makro merupakan bagian dari strategi

nasional untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan. Strategi nasional *e-Government* mencakup kepentingan negara dan integrasi bangsa. *e-Government* pada level mikro merupakan pelaksanaan dari strategi nasional *e-Government*. Penerapan *e-Government* dilaksanakan oleh masing-masing instani. *e-Government* pada tingkat instansi dikembangkan berupa aplikasi. Implementasi aplikasi *e-Government* dikembangkan untuk mendukung tugas dan fungsi masing-masing instansi pemerintahan.

E-Government di level mikro merupakan strategi masing-masing instansi pemerintahan. *e-Government* pada level mikro lebih terfokus pada pemanfaatan aplikasi sistem informasi. Pengembangan aplikasi sistem informasi digunakan untuk mendukung tugas dan fungsi masing-masing instansi pemerintahan.

Nugroho dalam bukunya yang berjudul *Sistem Informasi Manajemen* menyebutkan bahwa *e-Government* adalah pengembangan aplikasi sistem informasi dan telekomunikasi di lingkungan pemerintahan (Nugroho, 2008:165).

Berdasarkan pengertian diatas, *e-Government* adalah pemanfaatan aplikasi Sistem Informasi dan Telekomunikasi dalam pemerintahan. Sstem Informasi Teknologi dikembangkan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing instansi pemerintahan. Instansi pemerintahan memiliki ruang lingkup tugas dan fungsi yang berbeda-beda. Pengembangan Sistem Informasi dan Telekomunikasi bertujuan agar TIK dapat digunakan secara efektif sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Konsep *e-Government* merupakan sebuah inisiatif yang tidak mudah dan murah. Inisiatif penerapan *e-Government* di daerah atau instansi pemerintahan

harus dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Tingkat kesiapan suatu daerah atau instansi pemerintahan merupakan faktor yang harus diperhitungkan. Kesiapan suatu daerah atau instansi pemerintahan dalam menerapkan *e-Government* menjadi hal penting yang harus ada.

Indrajit dalam bukunya yang berjudul *e-Government in Action*, menyebutkan bahwa faktor-faktor yang menentukan tingkat kesiapan sebuah daerah untuk menerapkan *e-Government*, yaitu sebagai berikut:

1. Infrastruktur;
2. konektivitas;
3. Kesiapan sumber daya manusia;
4. Ketersediaan anggaran;
5. perangkat hukum;
6. Perubahan paradigma.

(Indrajit, 2005:8)

Kesiapan suatu daerah atau instansi pemerintahan untuk menerapkan *e-Government* terkait dengan faktor-faktor tersebut diatas. *Pertama*, kesiapan infrastruktur yaitu perangkat keras seperti komputer, jaringan dan lain sebagainya. *Kedua*, tingkat konektivitas harus diketahui sejauh mana pemanfaatannya dalam membantu kegiatan sehari-hari. *Ketiga*, kesiapan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan keahlian dalam bidang TIK. *Keempat*, ketersediaan anggaran untuk biaya operasional, pemeliharaan dan pengembangan *e-Government*. *Kelima*, perangkat hukum yang dipersiapkan untuk menjamin terciptanya mekanisme *e-government* yang kondusif. *Keenam*, perubahan paradigma yaitu adanya keinginan untuk mengubah paradigma dan cara berpikir dalam menerapkan *e-Government*.

Amsyah dalam bukunya yang berjudul *Manajemen Sistem Informasi* mengemukakan bahwa efektivitas adalah sebagai berikut:

> "Kegiatan mulai dengan adanya fakta kegiatan sehingga menjadi data, baik yang berasal dari hubungan dan transaksi internal dan eksternal maupun berasal dari hubungan anatarunit dan di dalam unit itu sendiri. Berikutnya dilakukan pengolahan data agar menjadi informasi yang sesuai dengan keperluan unit masing-masing, siap digunakan kapan saja dan di mana saja, dengan kuantitas dan kualitas yang terjamin baik, dan yang paling penting adalah pengolahan dengan biaya yang sesuai." (Amsyah, 2005:130).

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka suatu kegiatan dikatakan efektif apabila *output* sesuai dengan yang diperlukan. *Output* merupakan hasil kegiatan dari unit-unit yang berkerja sama. Setiap unit kerja memberikan fakta kegiatan berupa data. Hubungan kerja yang dibentuk oleh setiap unit menunjukan adanya sistem kerja. Sistem kerja digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas yang ada dalam suatu organisasi. Kegiatan yang dilakukan sistem kerja harus menghasilkan *output* sesuai dengan yang diperlukan.

Amsyah menyebutkan indikator efektivitas pelayanan sistem informasi sebagai berikut:

1. Volume pekerjaan
2. Akurasi
3. Informasi tepat waktu
4. biaya.

(Amsyah, 2005:131)

Indikator efektivitas tersebut di atas terdiri dari volume pekerjaan, akurasi, informasi tepat waktu dan Biaya. *Pertama,* yaitu volume pekerjaan yang dilakukan sistem kerja semakin banyak dan meluas. *Kedua,* akurasi hasil pengolahan data sesuai dengan kapasitas kemampuannya dan dapat dapat digunakan oleh setiap unit kerja. *Ketiga,* informasi tepat waktu sehingga berguna

bagi para pemakainya. *Keempat,* peningkatan biaya, yaitu pemilihan alternatif biaya operasional dan biaya bahan baku yang ekonomis.

Winarno dalam bukunya yang berjudul *Sistem Informasi Manajemen*, menjelaskan bahwa sistem informasi adalah sebagai berikut:

> "Sekumpulan komponen yang saling bekerja sama, yang digunakan untuk mencatat data, mengolah data, dan menyajikan informasi untuk para pembuat keputusan agar dapat membuat keputusan dengan baik". (Winarno, 2006:1.6).

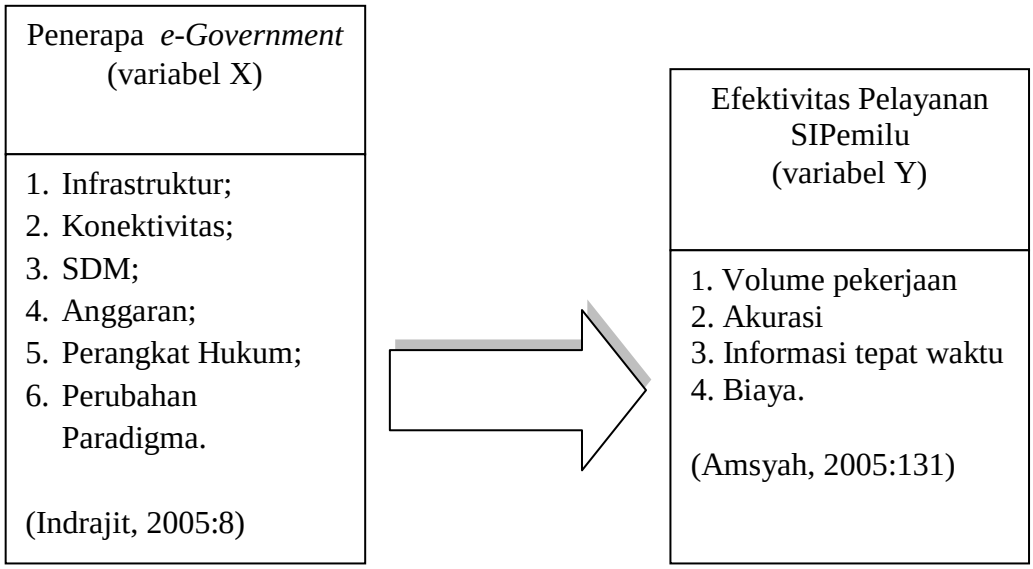
Pengertian di atas menjelaskan bahwa sistem informasi itu merupakan suatu alat atau aplikasi pendukung kerja. Sistem informasi digunakan untuk mencatat data, mengolah data dan menyajikan informasi. Sistem informasi akan berjalan jika memiliki sekumpulan komponen yang mendukungnya. Sekumpulan komponen dalam sistem informasi bekerjasama menghasilkan informasi dengan lebih baik. Unit-unit kerja dalam sistem kerja memerlukan informasi yang tepat, akurat dan relevan. Sistem informasi dapat digunakan untuk menghasilkan Informasi dengan lebih baik. Informasi diperlukan untuk membuat keputusan yang lebih baik.

Pendapat yang dijadikan dasar oleh peneliti untuk memperkuat asumsi adanya pengaruh kesiapan KPU Provinsi Jawa Barat menerapkan *e-Goverment* terhadap efektivitas pelayanan SIPemilu adalah

> "Secara teoritis terdapat dua alasan penerapan *e-Government* dalam lingkungan pemerintahan, antara lain : (1) penerapan *e-Government* adalah ditujukan untuk efektivitas, dan (2) Bahwa fungsi *e-Governement*, terutama untuk meningkatkan fungsi pelayanan pemerintah kepada masyarakat dengan dilakukan secara transparan sehingga diharapkan akan tercipta aparatur pemerintah yang kredibel, bersih dan bertanggung jawab (*good governance*)" (Kasiyanto, balitbang.depkominfo.go.id).

Peneliti melakukan penelitian dengan memfokuskan kepada dua variabel yaitu X dan Y. Kerangka pemikiran yang dikemukakan dapat dilihat Secara singkat dalam model kerangka pemikiran sebagai berikut:

Gambar 1.1
Bagan Model Kerangka Teori



Gambar model kerangka pemikiran di atas, menunjukan pengaruh antara Variabel X yaitu penerapan *e-Government* terhadap Variabel Y yaitu efektivitas pelayanan SIPemilu. Variabel X penerapan *e-Government* merupakan variabel yang mempengaruhi (independen) atau menjadi sebab timbulnya variabel Y (dependen) efektivitas pelayanan SIPemilu. Sehingga ini Penelitian ini mengemukakan dua variabel yang terkait dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Variabel Bebas atau Independen(X) : Data yang menjadi variabel bebas (X) dalam penelitian ini adalah penerapan *e-Government*.
2. Variable Terikat atau Dependen (Y) : Data yang menjadi variabel terikat (Y) adalah efektivitas pelayanan SIPemilu.

Operasionalisasi variabel dalam penelitian ini, yaitu tentang pengaruh kesiapan KPU Provinsi Jawa Barat terhadap efektivitas pelayanan SIPemilu. Operasionalisasi variabel tersebut dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1
Operasionalisasi Variabel

Variabel	Indikator	Sub indikator
Variabel X Kesiapan KPU Jawa Barat menerapkan *e-Government*	X1. Infrastruktur	1. Jaringan komunikasi; 2. Perangkat komputer; 3. Jaringan Informasi.
	X2. Konektivitas	1. Komputerisasi kerja; 2. Pemeliharaan TI; 3. Perangkat Lunak
	X3. SDM	1. Pengetahuan TI; 2. Kompetensi; 3. Pendidikan dan Pelatihan;
	X4. Anggaran	1. Sumber dana; 2. Biaya operasional; 3. Biaya pemeliharaan; 4. Biaya pengembangan.
	X5. Perangkat hukum	1. Landasan Hukum; 2. Jaminan Peraturan Hukum;
	X6. Perubahan Paradigma	1. Proses kerja baru; 2. Inisiatif pelaksanaan TI; 3. Penggunaan TI

(Indrajit, 2005:8)

Variabel	Indikator	Sub Indikator
Variabel Y Efektivitas Pelayanan SIPemilu	Y1. Volume pekerjaan	1. Kapasitas kerja; 2. Hubungan kerja; 3. Beban kerja.
	Y2. Akurasi	1. Tepat guna; 2. Sesuai dengan Fakta.
	Y3. Informasi tepat waktu	1. Mudah diakses; 2. Proses pengolahan data.
	Y4. Biaya	1. Personel; 2. Bahan baku..

(Amsyah, 2003:131)

Berdasarkan uraian di atas, peneliti mengajukan hipotesis penelitian sebagai berikut:

"Kesiapan KPU Provinsi Jawa Barat menerapkan *e-Government* memiliki pengaruh yang positif terhadap efektivitas pelayanan SIPemilu dalam Pemilihan Gubernur"

Hipotesis statistik yang diajukan adalah:

1. H_0 : "tidak terdapat pengaruh kesiapan KPU Provinsi Jawa Barat menerapkan *e-Government* terhadap efektivitas pelayanan SIPemilu dalam Pemilihan Gubernur".
2. H_1: "terdapat pengaruh kesiapan KPU Provinsi Jawa Barat menerapkan *e-Government* terhadap efektivitas pelayanan SIPemilu dalam Pemilihan Gubernur".

1.6. Metodologi Penelitian

1.6.1. Metode Penelitian

Mengingat latar belakang permasalahan serta tujuan dari penelitian ini, maka metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian eksplanatif. Menurut Purwanto dalam bukunya *Metode Penelitian Kuantitatif*, menjelaskan

bahwa penelitian eksplanatif adalah “bertujuan membangun penjelasan mengenai faktor-faktor serta mekanisme yang menyebabkan terjadinya fenomena yang diteliti”.(Purwanto, 2007:32).

Penelitian eksplanatif bertujuan untuk membangun penjelasan mengenai faktor-faktor serta mekanisme yang menyebabkan terjadinya fenomena yang diteliti. Peneliti menggunakan metode penelitian eksplanatif, dimaksudkan untuk membangun penjelasan mengenai kesiapan KPU Provinsi Jawa Barat menerapkan *e-Government* terhadap efektivitas pelayanan SIPemilu. Penelitian dilakukan melalui observasi, studi pustaka, penyebaran angket dan wawancara pada aparatur KPU Provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan metode penelitian yang digunakan, maka peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif menurut Sugiyono diartikan sebagai:

> “Metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivism, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah diterapkan.” (Sugiyono, 2009:14).

Pendekatan kuantitatif pada dasarnya digunakan untuk menguji suatu teori, mendeskripsikan statistik dan untuk menunjukan pengaruh antara dua variabel. Variabel yang dimaksud yaitu penerapan *e-Government* sebagai variabel X dan efektivitas pelayanan SIPemilu sebagai variabel Y.

1.6.2 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan cara-cara untuk memperoleh data dan keterangan yang diperlukan dalam penelitian., maka peneliti melakukan pengumpulan data untuk menunjang penelitian sebagai berikut:

1. Observasi

   Observasi yang dilakukan peneliti yaitu dengan melakukan pengamatan secara langsung di lokasi KPU Provinsi Jawa Barat. Observasi non-partisipan ini merupakan pengumpulan data dengan cara peneliti berada di luar subjek yang diteliti dan tidak ikut dalam kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan, sehingga peneliti dapat lebih mudah mengamati tentang data dan informasi yang diharapkan dalam menganalisis dan mengambil kesimpulan.

2. Angket

   Merupakan Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menyebarkan angket yang berisi pernyataan tertulis kepada para responden yang dalam hal ini adalah aparatur KPU Provinsi Jawa Barat. Angket dibuat dalam bentuk pertanyaan yang bersifat tertutup yang telah diberi skor dan setiap objek diminta untuk memilih salah satu alternatif jawaban yang telah ditentukan.

3. Studi pustaka

   Yaitu pengumpulan data dengan cara mempelajari dan membaca untuk mendapatkan landasan teori atau pemikiran serta data-data empiris yang bersumber dari buku-buku, catatan-catatan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

4. Wawancara

   Peneliti melakukan wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terkait di KPU Provinsi Jawa Barat untuk menunjang informasi yang dibutuhkan dan mempunyai hubungan langsung dengan masalah yang tengah diteliti.

1.6.3 Populasi dan Sampel

Arikunto mengungkapkan bahwa "Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian" (Arikunto, 1998:130). Populasi merupakan obyek atau subyek yang berada pada suatu wilayah yang memenuhi syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian.

Populasi yang digunakan adalah aparatur KPU Provinsi Jawa Barat. Jumlah Populasi sumber daya manusia yang diambil berdasarkan data dari KPU Provinsi Jawa Barat yang berlaku pada tahun 2010 sebanyak 52 Aparatur. Angket akan dibagikan kepada 52 Aparatur sebagai responden yang berada di KPU Provinsi Jawa Barat dengan pembagian sebagai berikut:

Tabel 1.2
Jumlah Populasi
Aparatur KPU Provinsi Jawa Barat

No.	Nama Bagian/Bidang	Jumlah
1.	Komisionis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat	5
2.	Sekretaris	1
2.	Bagian Program, Data Organisasi dan SDM	13
3.	Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	20
4.	Bagian Hukum Teknis dan HUPMAS	13
Jumlah		**52**

(Sumber: Sub Bag. Organisasi dan SDM KPU Provinsi Jawa Barat, 2010)

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti (Arikunto, 1998:131). Mengingat subjek yang diteliti adalah seluruh aparatur KPU Provinsi

Jawa Barat, maka dalam penelitian ini dilaksanakan dengan cara Sensus. Menurut Kristianto (2010:5), Sensus adalah cara pengumpulan data dan informasi, jika keseluruhan unit didalam populasi dilakukan pengamatan, dengan kata lain sensus dapat dikatakan sebagai suatu pencatatan/perhitungan yang lengkap. Sensus memberikan hasil data dengan nilai sebenarnya (*true value* atau *parameter*).

1.6.4 Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa kuantitatif. Teknik pengumpulan data hasil kuesioner dalam penelitian kuantitatif, menggunakan skala *Likert* dimana alternatif jawaban nilai positif 5 sampai dengan 1. Pemberian skor dilakukan atas jawaban pertanyaan, baik dengan penerapan *e-Government* (variabel X) maupun efektivitas pelayanan SIPemilu (variabel Y). Jawaban setiap item angket yang menggunakan skala likert yang berupa data ordinal mempunyai gradasi sangat positif yang dapat berupa kata-kata sebagai berikut :

Tabel 1.3
Penentuan Pemberian Nilai Skor Likert

Jawaban pertanyaan	Skor
Sangat Setuju (SS)	5
Setuju (ST)	4
Kurang Setuju (KS)	3
Tidak Setuju (TS)	2
Sangat Tidak Setuju (STS)	1

(Sumber : Sugiyono, 2009:94)

Analisis data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan alat bantuan yaitu *software* SPSS 17.00 untuk mempermudah perhitungan. SPSS (*Statistical Product and Service Solution*) merupakan program aplikasi yang digunakan untuk

melakukan perhitungan statistik dengan menggunakan komputer. Kelebihan dari program ini adalah dapat melakukan analisis data lebih cepat dan tepat untuk perhitungan statistik dari yang mulai sederhana hingga rumit sekalipun.

Kemudian dengan teknik pengumpulan angket, maka masing-masing item pertanyaan yang diperoleh dari 52 aparatur responden tersebut misalnya sebagai berikut:

Aparatur Responden	Alternatif jawaban
2 orang menjawab	SS
18 orang menjawab	ST
20 orang menjawab	KS
7 orang menjawab	TS
5 orang menjawab	STS

Berdasarkan skor yang telah ditetapkan dapat dihitung sebagai berikut :

Jumlah skor untuk 2 orang yang menjawab SS	=	2 x 5	=	10
Jumlah skor untuk 18 orang yang menjawab ST	=	18 x 4	=	72
Jumlah skor untuk 20 orang yang menjawab KS	=	20 x 3	=	60
Jumlah skor untuk 7 orang yang menjawab TS	=	7 x 2	=	14
Jumlah skor untuk 5 orang yang menjawab STS	=	5 x 1	=	5
Total Skor			=	161

Berdasarkan tabel tanggapan, maka untuk menghitung presentase masing-masing tanggapan responden dapat dicari menggunakan rumus berikut ini:

$$\frac{\text{Frek. Masing-masing tanggapan responden x 100\%}}{\text{Jumlah keseluruhan Frek}}$$

Misal berdasarkan skor yang diperoleh di hitung sebagai berikut:

$$\frac{\text{2 (responden yang menjawab SS) X 100\%}}{\text{52 responden}} = 3{,}85\%$$

$$\frac{\text{18 (responden yang menjawab ST) X 100\%}}{\text{52 responden}} = 34{,}62\%$$

$$\frac{\text{20 (responden yang menjawab KS) X 100\%}}{\text{52 responden}} = 38{,}46\%$$

$$\frac{\text{7 (responden yang menjawab TS) X 100\%}}{\text{52 responden}} = 13{,}46\%$$

$$\frac{\text{5 (responden yang menjawab STS) X 100\%}}{\text{52 responden}} = 9{,}62\%$$

Kemudian ditentukan rentang skor setiap item pertanyaan yang mewakili variabel X dan Variabel Y. Kriteria pengklasifikasian yang peniliti gunakan, mengacu pada ketentuan-ketentuan yang dikemukakan oleh Husein Umar (2004:164), dimana rentang skor diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

$$Rs = \frac{n(m-1)}{m}$$

Dimana:
Rs = Rentang Skor
n = Jumlah Responden
m = Jumlah alternatif jawaban tiap item

Selanjutnya untuk menetapkan peringkat dalam setiap variabel penelitian dapat dilihat dari perbandingan antara skor aktual dengan skor ideal. Skor aktual diperoleh melalui hasil perhitungan seluruh pendapat responden sesuai klasifikasi bobot yang diberikan (1,2,3,4 dan 5). Berdasarkan ketentuan ini, maka kriteria pengklasifikasian mengenai variabel Penerapan *e-Government* dan Efektivitas Pelayanan SIPemilu adalah sebagai berikut:

$$Rs = \frac{52(5-1)}{5}$$

$$Rs = 41{,}6 = 42$$

Hasil perhitungan di atas, diketahui bahwa *Rs* adalah 42. Instrumen yang diberikan kepada responden aparatur KPU Provinsi Jawa Barat berjumlah 52.

perhitungan seluruh pendapat responden sesuai klasifikasi bobot yang diberikan (1,2,3,4 dan 5). Berdasarkan ketentuan tersebut, maka untuk memberikan pengklasifikasian terhadap total Skor pernyataan variabel X dan variabel Y, dapat dilihat pada Tabel 1.4 sebagai berikut:

Tabel 1.4 Kriteria Pengklasifikasian
Kesiapan KPU Provinsi Jawa barat menerapan *e-Government*
dan Efektivitas Pelayanan SIPemilu per-item pertanyaan

Variabel	Jumlah Skor		Jumlah Item	Rentang Pengklasifikasian
	Tertinggi	Terendah		
Penerapan *e-Government*	260	52	18	Sangat Tidak Baik (52-<94) Tidak Baik (94-<136) Cukup Baik(136-<178) Baik(178-<220) Sangat Baik (220-<262)
Efektivitas Pelayanan SIPemilu	260	52	9	Sangat Tidak Baik (52-<94) Tidak Baik(94-<136) Cukup Baik (136-<178) Baik (178-<220) Sangat Baik(220-<262)

(Husein Umar, 2004:164)

Selanjutnya untuk menggambarkan tanggapan dari responden secara keseluruhan pertanyaan quisioner dan per-indikator dapat dilihat dari perbandingan antara skor aktual dengan skor ideal. Skor aktual diperoleh melalui hasil perhitungan seluruh pendapat responden sesuai klasifikasi bobot yang diberikan (1,2,3,4 dan 5), dengan perhitungan sebagai barikut:

a) Perhitungan Skor Aktual Variabel X

Bobot tertinggi 5 x 52 x 18=4680

Bobot terendah 1 x 52 x18 = 936

Selisih Bobot tertinggi- Bobot terendah = 4680-936

= (3744/5 x 52 x18)x 100%

= 0,8 x100 %

= 80%

Interval skor = 80% : 5 = 16%

b) Perhitungan Skor Aktual Variabel Y

Bobot tertinggi 5 x 52 x 9=2340

Bobot terendah 1 x 52 x 9= 468

Selisih Bobot tertinggi- Bobot terendah = 2340-468

= (1872/5 x 52 x9)x 100%

= 0,8 x100 %

= 80%

Interval skor = 80% : 5 = 16%

Tabel 1.5
Kriteria Persentase Skor Tanggapan Responden Terhadap Skor Ideal

No	% Jumlah Skor	Kriteria
1	20.00% – 36.00%	Tidak Baik
2	36.01% – 52.00%	Kurang Baik
3	52.01% – 68.00%	Cukup
4	68.01% – 84.00%	Baik
5	84.01% – 100%	Sangat Baik

(Sumber: Narimawati, 2007:85)

Penelitian ini bertujuan untuk mencari pengaruh (korelasi) antara penerapan *e-Government* (X) terhadap efektivitas pelayanan SIPemilu (Y). Penelitian dilaksanakan untuk mendapatkan besaran nilai koefisien determinasi.

Mengingat data yang digunakan peneliti adalah data ordinal, maka untuk mencari besarnya korelasi antara variabel bebas dengan variabel terikat dapat digunakan rumus analisis korelasi non-parametris yaitu korelasi *Rank Spearman* sebagai berikut:

$$rs = \frac{1 - 6\sum di^2}{n - \left(n^2 - 1\right)}$$

Dimana:
Rs = Koefisien korelasi Rank Spearman
Di^2 = Perbedaan ranking antara variabel X dan Variabel Y
n = Banyaknya responden
(Arikunto, 1998:262)

Setelah koefisien korelasi rank spearman (rs) diperoleh, kemudian dilanjutkan dengan melakukan pendistribusian (rs) kedalam pengujian uji t untuk menguji tingkat signifikansi korelasi tersebut, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Jika nilai r > 0, artinya terjadi hubungan linear positif, yaitu semakin besar nilai variabel X (*independent*), maka semakin besar pula nilai variabel Y (*dependent*).
2. Jika nilai r < 0, artinya terjadi hubungan linear negatif, semakin kecil nilai variabel X (*independent*), maka semakin kecil nilai variabel Y (*dependent*).
3. Jika nilai r = 0, artinya tidak ada hubungan sama sekali antara variabel X (*independent)* dengan variabel Y (*dependent*).

4. Jika nilai r =1 atau -1, artinya terjadi hubungan linear sempurna yaitu berupa garis lurus untuk r yang semakin mengarah angka 0, maka garis semakin tidak lurus.

Peneliti menggunakan pedoman untuk menginterpretasi nilai korelasi, sebagai berikut:

Tabel 1.6
Interpretasi Tingkat Hubungan Korelasi

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0,00 – 0,199	Sangat Rendah
0,20 – 0,399	Rendah
0,40 – 0,599	Cukup Kuat
0,60 – 0,799	Kuat
0,80 – 1,000	Sangat Kuat

Sumber : Riduwan (2003:228)

Rumusan pengujian hipotesis yang diuji dalam penelitian ini adalah mengenai ada atau tidaknya pengaruh antara variabel yang diteliti. Pengujian signifikasi hubungan antara variabel perlu di uji signifikasinya. Untuk mengetahui pengaruh antara kedua variabel terhadap hubungan yang saling mempengaruhi antara variabel X dan Y.

Pasangan data yang akan diuji berdasarkan data adalah sebagai berikut:

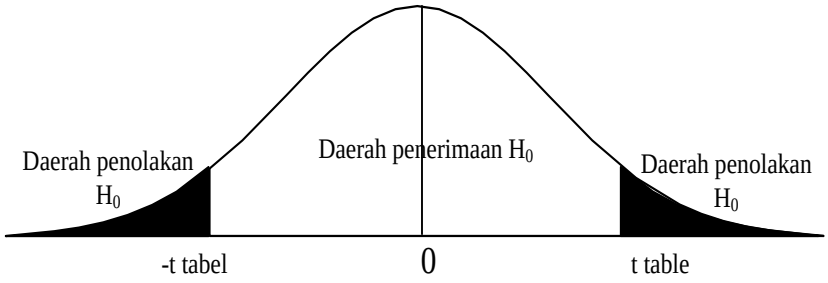
H_0: $\rho = 0$ artinya, variabel X (penerapan *e-Government*) tidak ada pengaruh terhadap variabel Y (efektivitas pelayanan SIPemilu).

H_1: $\rho \neq 0$ artinya, variabel X (penerapan *e-Government*) ada pengaruh terhadap variabel Y (efektivitas pelayanan SIPemilu).

Untuk mengetahui Ho diterima atau ditolak, digunakan uji signifikansi yaitu:

a. Jika t hitung > t tabel 0,01 (dk = n-2) maka H_0 ditolak, H_1 diterima.
b. Jika t hitung < t tabel 0,01 (dk = n-2) maka H_0 diterima, H_1 ditolak.

Gambar 1.2
Uji daerah Penerimaan dan penolakan Hipotesis



(Sugiyono, 2009:258)

Ada atau tidaknya pengaruh perubahan antara variabel penerapan *e-Government* terhadap variabel efektivitas pelayanan sistem informasi Pemilu dilakukan penghitungan dengan rumus analisa koefisien determinasi sebagai berikut:

$$KD = r^2 \times 100\%$$

Keterangan:

KD : koefisien determinasi
r : koefisien korelasi
(Narimawati, 2007:89)

1.6.5 Uji Validitas Dan Uji Reliabilitas

Uji validitas instrumen dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh instrumen penelitian mampu mencerminkan isi sesuai dengan hal dan sifat yang diukur. Artinya, setiap butir instrumen telah benar-benar menggambarkan keseluruhan isi atau sifat bangun konsep yang menjadi dasar penyusunan instrumen.

Validitas menunjukan sejauh mana alat pengukur itu mengukur apa yang akan diukur, sejauh mana alat ukur yang digunakan mengenai sasaran. Semakin

tinggi validitas suatu alat test maka alat tersebut semakin mengenai pada sasarannya, atau semakin menunjukan apa yang seharusnya diukur. Syarat untuk mengetahui pertanyaan yang valid dan yang tidak valid yaitu dengan tingkat singnifikan r kritis = 0,22, apabila alat ukur tersebut berada kurang dari 0,22 maka butir pernyataan tersebut tidak valid. Pengujian validitas dalam penelitian ini, peneliti menggunakan bantuan program SPSS 17.0 *for Windows*.

Adapun penguji statistik mengacu pada kriteria :

- $r_{hitung} < r_{kritis}$ maka tidak valid
- $r_{hitung} > r_{kritis}$ maka valid

(Sugiyono, 2009:126).

Uji keandalan (reliabilitas) digunakan untuk menguji kekonstanan dan ketepatan hasil pengukuran kuisioner yang erat hubungannya dengan masalah kepercayaan (Nazir, 1999:234). Suatu taraf tes dikatakan mempunyai kepercayaan bila tes tersebut memberikan hasil yang tepat. Uji realibitas merupakan syarat mutlak untuk menentukan pengaruh variabel yang satu terhadap yang lainnya.

Pengujian reliabilitas penelitian menggunakan rumus *Alpha – Cronbach*. yaitu melalui variasi skor butir pernyataan dengan variasi total skor keseluruhan butir pertanyaan dengan rumus sebagai berikut:

$$r_i = \frac{2r_b}{1 + r_b}$$

Keterangan :

r_i = reliabilitas untuk seluruh instrumen
r_b = korelasi *product moment* antara belahan pertama dan belahan kedua
(Sumber : Sugiyono, 2009:131)

1.7. Lokasi dan Jadwal Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor KPU Provinsi Jawa Barat Jl. Garut No. 11 Telp. 7278809-7278812, Fax. 7215894-7206157 Bandung. Adapun waktu penelitian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.7
Jadwal Penelitian

Waktu / Kegiatan	Tahun 2010							2011					
	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb
Penyusunan rancangan Judul	■	■											
Penyusunan Usulan Penelitian		■	■										
Seminar Usulan Penelitian				■									
Pengumpulan Data					■	■	■						
Pengolahan Data								■	■				
Pembuatan Laporan										■	■	■	
Sidang Ujian Skripsi													■